

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih objek ini sebagai objek penelitian karena menurut informasi yang diperoleh peneliti, bahwa kinerja auditor yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi pada pertengahan tahun 2018 selesai tidak sesuai target (Asmara, 2018). Hal ini membuat peneliti memilih objek penelitian ini karena terdapat kejanggalan pada auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berdiri sejak diterbitkannya Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Berdasarkan Keppres tersebut Kantor DJPKN (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara - Depkeu) Wilayah III Jawa Barat, berubah status mengikuti perubahan struktur organisasi di pusat menjadi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Selama kurun waktu lebih dari seperempat abad keberadaannya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa perubahan kepemimpinan sebanyak 14 kali (BPKP, 2018).

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu audit pada pemerintah daerah dan satuan kerjanya, audit pada Instansi Pemerintah Pusat, audit pada BUMN dan Badan Usaha Lainnya, dan audit investigatif (BPKP, 2018). Struktur organisasi yang dimiliki Perwakilan BPKP Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan sembilan Korwas yaitu, Korwas Kelompok JFA Bidwas Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Korwas Kelompok JFA Bidwas Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah II, Korwas

Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara I, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara II, Korwas Kelompok JFA Bidang Investigasi I, Korwas Kelompok JFA Bidang Investigasi II, dan Korwas Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP. Kepala Bagian Tata Usaha juga dibantu tiga orang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab atas tupoksi dan masing-masing Subbagian, yaitu Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum (BPKP, 2018).

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah, pembinaan kepada BUMN/BUMD dan pembinaan kepada pihak lainnya (BPKP, 2018). Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, audit terhadap BUMN, Pertamina dan cabangnya, kontraktor bagi hasil, dan BUMD, evaluasi terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, audit investigasi, dan administrasi perwakilan BPKP di wilayah Jawa Barat (BPKP, 2018).

Jangkauan wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mencakup pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pemerintah daerah yang terdiri atas 1 (satu) pemerintahan provinsi, 9 (sembilan) pemerintahan kota dan 18 (delapanbelas) pemerintahan kabupaten termasuk Kabupaten Bandung Barat yang merupakan pemekaran Kabupaten Bandung yang dilakukan pada tahun 2006. Rincian pemerintahan daerah tersebut sebagai berikut:

- **Pemerintah Provinsi (1):** Provinsi Jawa Barat.
- **Pemerintah Kota (9):** Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan Kota Depok.
- **Pemerintah Kabupaten (18):** Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran (BPKP, 2018).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat resah karena tidak sesuai harapan mereka, yaitu mengharapkan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mewujudkan kinerja pemerintah yang baik merupakan tanggung jawab auditor internal pemerintah. Hal ini diperlukan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern yang baik pula agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kinerja auditor internal adalah prestasi kerja yaitu proses dan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas pengawasan (Ruhbaniah, *et al.*, 2017).

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat. Salah satu fungsinya yaitu, melakukan audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit kepada instansi penyidik dan pemerintah lainnya (BPKP, 2018). Keberhasilan suatu organisasi mengemban misi pemeriksaan tergantung pada kinerja auditornya, termasuk pula kinerja auditor internal pemerintah pada BPKP Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan keuangan yang dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan.

Penulisan ini diangkat karena ternyata masih ditemukannya kinerja auditor internal yang masih kurang baik. Informasi yang diperoleh dari Asmara (2018), bahwa adanya keterlambatan penyampaian hasil audit yang baru-baru ini terjadi.

Penanganan Kasus Korupsi Penyertaan Modal Pemkot Cimahi hingga sekarang seperti tidak membuahkan hasil. Hal itu karena Kejaksaan Negeri Kota Cimahi masih menunggu hasil audit dari lembaga BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Barat yang tak kunjung diserahkan ke Penyidik yang seharusnya pada akhir Agustus 2018 sudah diserahkan sesuai perjanjian, tetapi hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Barat sampai sekarang belum juga diterima.

Selain kasus diatas, ada juga kasus lain yang juga dimuat di media elektronik oleh Ant (2018), bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih efektif melakukan pengawasan terhadap pembangunan, di tengah naiknya anggaran belanja negara setiap tahunnya. Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia mempunyai lembaga pengawasan yang begitu banyak, ada BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, belum lagi Kejaksaan, Polisi dan KPK. Hal itu berarti dari segi pengawasan tidak kurang, namun perlu sinkronisasi.

Kerja lembaga-lembaga pengawasan juga diharapkan dapat berkesinambungan dan saling berkoordinasi untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. Wapres mengatakan anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan hingga 100% setiap 10 tahun, namun kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang baik. Berdasarkan dua kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja BPKP yang salah satunya merupakan BPKP Perwakilan Jawa Barat disebabkan oleh kinerja auditor yang tidak sesuai dengan standar pekerja audit dan dianggap tidak menerapkan standar operasional (SOP) dalam melaksanakan audit dan juga perencanaan dan pengawasan pembangunan harus ditingkatkan agar banyaknya anggaran tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut penelitian Ramadika *et al.*, (2014), struktur audit membantu auditor dalam melakukan audit lebih menjadi terarah, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Staf audit yang tidak mengetahui struktur audit akan mengalami kesulitan dalam audit. Penelitiannya memberikan hasil yaitu struktur audit

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fembriani dan Budiarta (2016) memberikan hasil yaitu struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Menurut Agustina (2009), ketidakjelasan peran mengacu pada kurangnya kejelasan mengenai harapan dan metode untuk memenuhi harapan pekerjaan yang dikenal, dan konsekuensi dari kinerja atau peranan tertentu. Penelitian Agustina (2009), Widyastuti dan Sumiati (2011), serta Gunawan dan Ramdan (2012) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Sementara Fanani, *et al.*, (2008), Putra dan Ariyanto (2012), serta Maulana, *et al.*, (2012) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Menurut Fanani, *et al.*, (2008), konflik peran adalah suatu konflik yang timbul karena mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan aturan dan kemandirian profesional. Penelitian Fanani, *et al.*, (2008), Agustina (2009), Putra dan Ariyanto (2012), Maulana, *et al.*, (2012), serta Ermawati, *et al.*, (2014) mengungkapkan bahwa konflik peran berpengaruh pada kinerja auditor, namun penelitian Widyastuti dan Sumiati (2011), serta Gunawan dan Ramdan (2012) mengungkapkan bahwa konflik peran tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut dan karena terdapatnya inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu, maka membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“PENGARUH STRUKTUR AUDIT, KETIDAKJELASAN PERAN, DAN KONFLIK PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH (Studi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat Periode 2019)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Kinerja auditor internal adalah prestasi kerja yaitu proses dan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas pengawasan (Ruhbaniah, *et al.*, 2017). Kinerja auditor internal dinilai belum maksimal, karena masih terdapat banyak kasus pelanggaran

yang dilakukan oleh auditor internal yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kinerja auditor internal khususnya bagian pemerintah tentang tata kelola pemerintahan yang baik membuat masyarakat resah. Auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila menggunakan struktur audit yang sudah ditetapkan, namun auditor tidak jarang memiliki sedikit informasi yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sesuai perannya. Hal tersebut membuat auditor kerap mengalami tekanan seperti ketidakjelasan peran dan konflik peran dalam mengemban tugasnya sebagai auditor internal. Didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran menjadi faktor yang memengaruhi kinerja auditor internal.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik responden mengenai struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah pengaruh secara simultan struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah pengaruh secara parsial struktur audit terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah pengaruh secara parsial ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat?
6. Apakah pengaruh secara parsial konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden mengenai struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Propinsi Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Propinsi Jawa Barat;
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial struktur audit terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Propinsi Jawa Barat;
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Propinsi Jawa Barat;
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

1.6.1.1 Bagi Bagian Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian pada bidang yang sejenis khususnya hal-hal yang memengaruhi kinerja auditor internal pemerintah.

1.6.1.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal-hal yang memengaruhi kinerja auditor internal pemerintah. Peneliti selanjutnya dapat mengambil objek penelitian selanjutnya dari BPKP diluar Provinsi Jawa Barat atau pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat atau diluarnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1.6.2.1 Bagi Auditor Internal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian dan pengukuran untuk auditor internal pemerintah ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini supaya terjauhi dari faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, contohnya struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran yang berada pada diri auditor internal.

1.6.2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi saran untuk auditor internal dalam meningkatkan kinerja auditor internal pemerintah di BPKP Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga dapat meningkatkan prestasi kerja auditor internal pemerintah dalam melakukan tugasnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Raya Cibeureum No. 50 Bandung – Jawa Barat 40184 Telp. 022-6015108 – Fax. 022-6032096, E-mail: jabar@bpkp.go.id – humas.jabar@bpkp.go.id

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dimulai dari bulan September 2018. Periode penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah yang dihasilkan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah selama satu tahun yaitu 2019.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Pertama, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja auditor internal pemerintah. Kedua, penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian pada tiap babnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang diangkat oleh peneliti menjadi isu penting yang layak untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. Kemudian yang terakhir, bab ini menjelaskan mengenai sistematika tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas dan jelas isi dari masing-masing setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang dijadikan dasar penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti, serta kerangka teoritis yang membahas pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran teoritis, maka diajukan hipotesis penelitian yang akan diuji pada hasil dan pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Alat dan teknik pengumpulan data dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian meliputi uraian tentang jenis penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data yang diperlukan, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dan pembahasan mengenai analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan. Pengaruh masing-masing variabel variabel independen terhadap variabel dependen akan diketahui hasilnya baik secara parsial maupun simultan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan juga saran yang semoga berguna untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.